



**Kuasai Pahami dan Ketahui
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender**

“Ku PaKe PPRG”



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA**

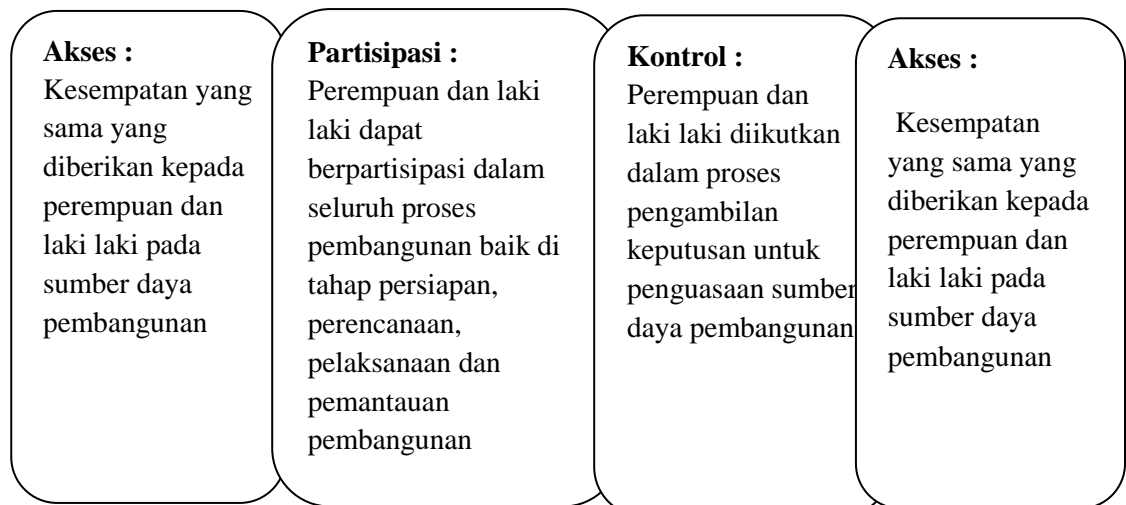
APA ITU PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)?

PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

- PPRG merupakan serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- PPRG dilaksanakan dalam rangka memastikan akses, partisipasi, dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki laki dan perempuan sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan setara baik oleh laki laki, perempuan dan kelompok rentan.

PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

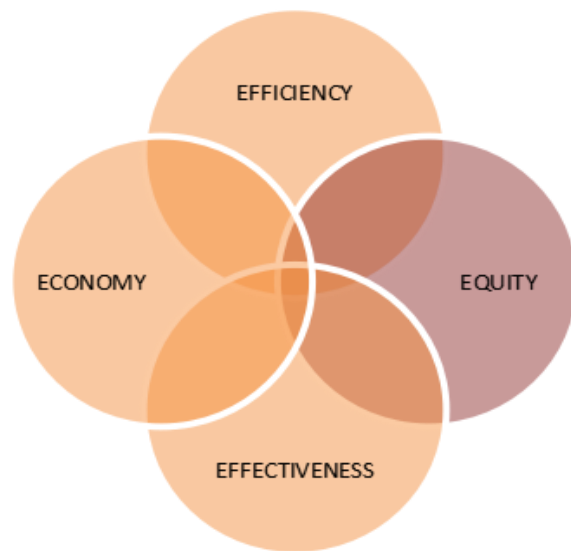
- Mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan sebaiknya dilakukan mulai dari penyusunan dokumentasi perencanaan strategis.
- Perencanaan yang responsif gender dapat ditempuh melalui beberapa peluang, antara lain sebagai berikut.
 - a. Integrasi gender dalam Musrenbang, dalam hal **akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.**



- b. Integrasi hasil analisis gender dan rumusan kerangka kinerja dalam RPJMD.
- c. Integrasi hasil analisis gender dalam Renstra OPD.
- d. Integrasi hasil analisis gender dalam RKPD.
- e. Integrasi hasil analisis gender dalam Renja OPD.

PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

- Penganggaran responsif gender merupakan bagian dari penyusunan pengalokasian anggaran yang mendorong kebijakan, pogram maupun kegiatan dalam perencanaan responsive gender, untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.
- Anggaran kinerja berbasis pada 3 (tiga) prinsip yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Anggaran Responsif Gender (ARG) menambah satu prinsip yaitu kesetaraan atau equity.



Anggaran Responsif Gender

Merupakan anggaran yang responsif atau sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Karakteristik

- Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan
- Meningkatkan keterlibatan aktif perempuan
- Monitoring dan evaluasi belanja pemerintah

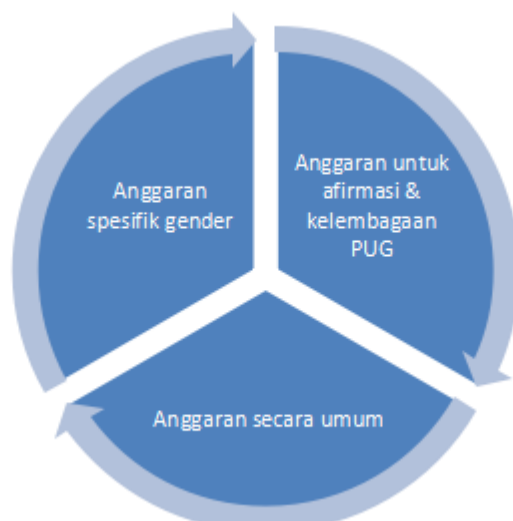
Prinsip

- Menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
- Bukan dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran atau penambahan dana khusus satu jenis kelamin
- Tidak berarti pembagian 50:50 antara laki-laki dan perempuan
- Tidak setiap program dan kegiatan anggarannya harus responsif gender

Kategori

- Anggaran khusus target gender/ mengarah kelompok spesifik, misal. Pelatihan ketrampilan bagi perempuan miskin
- Anggaran percepatan pencapaian kesetaraan, misal. Pendidikan staf perempuan
- Anggaran pengarusutamaan di semua bidang, misal. Pembangunan toilet terpisah laki-laki dan perempuan

KATEGORI ARG



- Instrumen ARG yaitu Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
- Penganggaran yang responsif gender dapat ditempuh melalui beberapa peluang, antara lain sebagai berikut
 - a. Integrasi Gender dalam KUA-PPAS
 - b. Integrasi Gender dalam RKA OPD
 - c. Integrasi Gender dalam DPA OPD

Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan perempuan sebagai salah satu sasaran pembangunan melalui program afirmasi selain empat kelompok lainnya yaitu anak-anak, difabel, lansia, dan kelompok miskin.



PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan GBS (Gender Budget Statemen).

Analisis gender :

- Merupakan identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki laki.
- Analisis gender dilakukan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway.

Gender Budget Statment (GBS)

- Merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender yang disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah kegiatan tersebut telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan serta menangani permasalahan gendernya.
- Disusun pada saat penyusunan RKA OPD. Identifikasi program/kegiatan yang akan disusun GBS nya sudah disusun setelah Renja OPD ditetapkan.

Keterkaitan GAP dan GBS

Tahapan	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program, kegiatan, IKK, output kegiatan
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Tujuan output/sub output
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (komponen-komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data dasar (baseline)	Dampak/hasil output kegiatan
Langkah 9	Indikator gender	Dampak/hasil output kegiatan

LANGKAH GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan :	Data Pembuka Wawasan :	Faktor Kesenjangan :	Sebab Kesenjangan Internal :	Sebab Kesenjangan Eksternal :	Reformulasi Tujuan :	Rencana Aksi :	Basis Data :	Indikator Gender :
<p>Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan dan sasaran. Kebijakan/program/kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang:</p> <p>a) Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SPM dan SDGs.</p> <p>b) Merupakan prioritas pembangunan daerah</p> <p>c) Mempunyai alokasi anggaran yang besar</p> <p>d) Penting terkait isu gender.</p>	<p>Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.</p>	<p>Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:</p> <p>a) akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;</p> <p>b) partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;</p> <p>c) kontrol, yaitu identifikasi apakah</p>	<p>Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.</p>	<p>Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.</p>	<p>Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.</p>	<p>Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>	<p>Berisi base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.</p>	<p>Berisi indikator Gender yang mencakup capaian output maupun outcome yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.</p>

		kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan d) manfaat , yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki- laki						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

CONTO

ANALISIS GENDER METODE GAP DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan/Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Internal	Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator Gender
<p>Program Program pelayanan pencatatan Sipil Tujuan Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat Kegiatan Kegiatan pelayanan kelahiran dan kematian</p>	<p>1. Tersedianya data kependudukan yang valid sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan kependudukan</p> <p>2. Perubahan Peraturan-peraturan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin memberi kemudahan pada masyarakat untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting</p> <p>3. Jumlah kepemilikan akta kelahiran</p>	<p>1. Belum adanya sinkronisasi dokumen perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan</p> <p>2. Peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat pusat belum menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru.</p> <p>3. Masih adanya ketentuan denda administrasi kependudukan.</p> <p>4. Belum optimalnya komunikasi dalam edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen</p>	<p>1. Belum tersedianya anggaran penyusunan dokumen perencanaan kebijakan kependudukan oleh tenaga ahli yang kompeten di bidang kependudukan</p> <p>2. Belum tersusunnya regulasi tentang perubahan peraturan administrasi kependudukan</p> <p>3. Terbatasnya SDM petugas pelayanan</p> <p>4. Adanya Perubahan peraturan administrasi kependudukan yang belum dipahami masyarakat</p>	<p>1. Perhatian pemerintah pusat (Kemendagri) terhadap SDM mendukung pelayanan kurang</p> <p>2. Kesadaran masyarakat atas pelaporan kematian masih kurang.</p> <p>3. Tidak semua user mempersyaratkan akta kematian</p>	<p>Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat, dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak.</p>	<p>1. Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi dengan integrasi semua data Administrasi Kependudukan ke database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan pelayanan jemput bola, optimalkan fungsi tugas registra kelurahan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama</p>	<p>Data Tahun 2019 akan dilaksanakan:</p> <p>1. 16 jenis jasa Pengadaan Dokumen Sekuriti dan Non Sekuriti Pencatatan Sipil</p> <p>2. 45 kali Frekuensi Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil</p> <p>3. 45 kali Frekuensi Layanan Percepatan Akta di Wilayah Yang Bekerjasama Dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran</p> <p>5. 33 Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pencatatan Sipil</p>	<p>1. Tertib administrasi kependudukan masyarakat</p> <p>2. Meningkat Indeks tertib administrasi kependudukan 80,00% Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun dan atau dari jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan akta kematian.</p> <p>3. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan</p>

	<p>4. 75,00% Jumlah kepi likan akta kematian bagi penduduk meninggal 85,00%</p> <p>5. Adanya sarana pendukung dan inovasi pelayanan untuk memudahkan akses pelayanan dokumen kependuduka n dan pencatatan sipil melalui penyelenggar aan sosialisasi, pel ayanan jemput bola, pelayanan mobile, dan pelayanan 3 in 1</p> <p>Data Tahun 2018 dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 16 jenis jasa Pengadaan Documen Sekurity dan Non Sekurity Pencatatan Sipil 2. 45 kali Frekuensi Sosialisasi 	<p>5. kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>6. Belum tuntasnya kepemilikan identitas penduduk bagi seluruh warga Kota Yogyakarta.</p> <p>6. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk (seluruh kelompok umur) di Kota Yogyakarta.</p>				<p>pemanfaatan data kependudukan.</p>		<p>perkembangan kependuduka n sebagai dasar pembanguna n nasional dan daerah</p>
--	---	---	--	--	--	---------------------------------------	--	--

	<p>Bidang Pencatatan Sipil</p> <p>3. 45 kali Frekuensi Layanan Percepatan Akta di Wilayah</p> <p>4. 4 Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran</p> <p>5. 33 Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pencatatan Sipil</p>							
<p>Kegiatan Pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan</p>	<p>1. Adanya sarana pendukung dan inovasi pelayanan untuk memudahkan akses pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelayanan jemput bola, pelayanan mobile, dan</p>	<p>1. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>2. Perlunya mensukseskan</p>	<p>1. Belum tersedianya anggaran penyusunan dokumen perencanaan kebijakan kependudukan oleh tenaga ahli yang kompeten di bidang kependudukan</p> <p>2. Belum tersusunnya regulasi tentang perubahan peraturan administrasi kependudukan</p> <p>3. Terbatasnya</p>	<p>Belum seluruh penduduk tertib administrasi kependudukan</p>	<p>Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat, dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak.</p>	<p>Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan</p>	<p>Tahun 2019 akan dilaksanakan:</p> <p>1. 450 Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi</p> <p>2. 5.0000 data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang Dientry dalam Database SIAK</p> <p>3. 28 jenis jasa Cetak Non Security Printing</p> <p>4. 11 Laporan Pelayanan</p>	<p>Tersedianya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.</p>

	<p>elayanan 3 in 1</p> <p>Tahun 2018 dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 450 Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi 2. 5.0000 data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang Dientry dalam Database SIAK 3. 28 jenis jasa Cetak Non Security Printing 4. 11 Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Pencatatan Sipil 	<p>Program pencanangan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Masih rendahnya tertib administrasi kependudukan bagi pendatang dan orang asing. 	<p>SDM petugas pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya Perubahan peraturan administrasi kependudukan yang belum dipahami masyarakat 					<p>Akta Perkawinan dan Perceraian Pencatatan Sipil</p>	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

LANGKAH GBS (Gender Budget Statement)

1. Kebijakan/Program/Kegiatan

Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu gender, dimana rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multi years, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.

2. Analisis Situasi

Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari langkah GAP disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentifikasi melalui aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

3. Rencana Aksi

Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.

4. Indikator Kinerja

Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.

5. Anggaran

Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

6. Tanda Tangan Penandatanganan GBS adalah Kepala SKPD.

CONTO

**FORMAT GBS DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA**

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
TAHUN ANGGARAN	2019
PROGRAM	Program pelayanan pencatatan Sipil
KODE PROGRAM	02.06 02.06.01 048
ANALISIS SITUASI	<p>Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat. dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan tujuan yaitu untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2017 – 2022 pada misi yang ke 7, yaitu : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dalam rangka mendukung misi tersebut, tujuannya adalah Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat.</p> <p>Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : Untuk mewujudkan tujuan, yaitu “ Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat, maka ditetapkan sarasannya adalah “ Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat “</p> <p>Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah indeks tertib administrasi kependudukan dengan formula indikator sasaran OPD yaitu 50 % kepemilikan dokumen kependudukan di tambah 50 % penerbitan dokumen pencatatan sipil. Dengan indikator sasaran OPD sebagai mana tersebut diatas maka target sasaran OPD adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) . 2. Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun dan atau dari jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan akta kematian. 3. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi.
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolok Ukur Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat, dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak</p> <p>Indikator dan Target Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertib administrasi kependudukan masyarakat 2. Meningkat Indeks tertib administrasi kependudukan 80,00% Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun dan atau dari jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan akta kematian.

	<p>3. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah.</p> <p>4. Tersedianya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.</p>																
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 431.492.307																
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td></td> <td> <p>1. Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi dengan integrasi semua data Administrasi Kependudukan ke database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan pelayanan jemput bola, optimalkan fungsi tugas registra kelurahan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama pemanfaatan data kependudukan.</p> </td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 375.673.048</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td> <p>1. 16 jenis jasa Pengadaan Documen Security dan Non Security Pencatatan Sipil</p> <p>2. 45 kali Frekuensi Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil</p> <p>3. 45 kali Frekuensi Layanan Percepatan Akta di Wilayah</p> <p>4. 4 Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran</p> <p>33 Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pencatatan Sipil</p> </td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td> <p>1. Tertib administrasi kependudukan masyarakat</p> <p>2. Meningkat Indeks tertib administrasi kependudukan 80,00% Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun dan atau dari jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan akta kematian.</p> <p>3. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah.</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 55.819.259</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td> <p>1. 450 Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi</p> <p>2. 5.0000 data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang Dientry dalam Database SIAK</p> <p>3. 28 jenis jasa Cetak Non Security Printing</p> <p>4. 11 Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Pencatatan Sipil</p> </td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Tersedianya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.</td> </tr> </table>		<p>1. Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi dengan integrasi semua data Administrasi Kependudukan ke database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan pelayanan jemput bola, optimalkan fungsi tugas registra kelurahan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama pemanfaatan data kependudukan.</p>	Masukan	Rp. 375.673.048	Keluaran	<p>1. 16 jenis jasa Pengadaan Documen Security dan Non Security Pencatatan Sipil</p> <p>2. 45 kali Frekuensi Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil</p> <p>3. 45 kali Frekuensi Layanan Percepatan Akta di Wilayah</p> <p>4. 4 Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran</p> <p>33 Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pencatatan Sipil</p>	Hasil	<p>1. Tertib administrasi kependudukan masyarakat</p> <p>2. Meningkat Indeks tertib administrasi kependudukan 80,00% Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun dan atau dari jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan akta kematian.</p> <p>3. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah.</p>		Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Masukan	Rp. 55.819.259	Keluaran	<p>1. 450 Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi</p> <p>2. 5.0000 data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang Dientry dalam Database SIAK</p> <p>3. 28 jenis jasa Cetak Non Security Printing</p> <p>4. 11 Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Pencatatan Sipil</p>	Hasil	Tersedianya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.
	<p>1. Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi dengan integrasi semua data Administrasi Kependudukan ke database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan pelayanan jemput bola, optimalkan fungsi tugas registra kelurahan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama pemanfaatan data kependudukan.</p>																
Masukan	Rp. 375.673.048																
Keluaran	<p>1. 16 jenis jasa Pengadaan Documen Security dan Non Security Pencatatan Sipil</p> <p>2. 45 kali Frekuensi Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil</p> <p>3. 45 kali Frekuensi Layanan Percepatan Akta di Wilayah</p> <p>4. 4 Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran</p> <p>33 Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pencatatan Sipil</p>																
Hasil	<p>1. Tertib administrasi kependudukan masyarakat</p> <p>2. Meningkat Indeks tertib administrasi kependudukan 80,00% Meningkatnya persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil berupa cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun dan atau dari jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan akta kematian.</p> <p>3. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah.</p>																
	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan																
Masukan	Rp. 55.819.259																
Keluaran	<p>1. 450 Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi</p> <p>2. 5.0000 data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang Dientry dalam Database SIAK</p> <p>3. 28 jenis jasa Cetak Non Security Printing</p> <p>4. 11 Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Pencatatan Sipil</p>																
Hasil	Tersedianya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.																

Yogyakarta, _____

Kepala OPD

()